

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PENDIDIKAN

Maulidia Choifa Almahmuda¹, Fathimatuz Zahro², Hayat³

Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2025

Revised Januari 2025

Accepted Januari 2025

Available online Januari 2025

Kata Kunci:

Etika administrasi, transparansi, dan akuntabilitas

Keywords:

Administrative ethics, transparency and accountability

ABSTRAK

Etika administrasi public memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel dan berintegrasi. Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip etika administrasi publik disektor pendidikan, termasuk pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta manajemen lembaga pendidikan. Penerapan etika ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga mencegah prakti-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kali menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Selain itu, etika administrasi public berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan akses pendidikan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan utama dalam penerapan etika administrasi public di pendidikan serta memberikan rekomendasi strategis untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, profesional,

dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Public administration ethics has an important role in improving the quality of transparent, accountable and integrated educational governance. This article discusses the application of the principles of public administration ethics in the education sector, including the importance of honesty, responsibility and fairness in decision making and management of educational institutions. The application of this ethics not only strengthens public trust in educational institutions, but also prevents practices of corruption, collusion and nepotism which often become challenges in the world of education. Apart from that, public administration ethics functions as a foundation for creating inclusive and fair access to education for all levels of society. This article also highlights the main challenges in implementing public administration ethics in education and provides strategic recommendations for realizing better educational governance, professional and responsible.

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yng pesat, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan menjadi semakin mendesak. Pendidikan berfungsi sebagai salah satu pilar utama pembangunan suatu bangsa, yang tidak

hanya bertanggung jawab mencetak generasi yang terampil, tetapi juga membangun karakter dan nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas. Dalam konteks ini, etika administrasi publik menjadi elemen yang sangat krusial, tidak hanya sebagai norma dan nilai, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku dan keputusan para pemangku kepentingan dalam sector pendidikan. Etika administrasi publik merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh para penyelenggara negara, termasuk di dalamnya para pengelola pendidikan. Etika ini mencakup aspek kejujuran tanggung jawab, keadilan, dan transparansi. Penerapan etika ini sangat penting, karena keputusan yang diambil dalam konteks pendidikan berdampak langsung terhadap masyarakat luas, terutama generasi muda. Dengan mengedepankan etika, diharapkan setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan.

Transparansi dalam tata kelola pendidikan mencakup keterbukaan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta hasil dari berbagai program pendidikan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang memadai tentang bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan dan apa saja hasil yang dicapai. Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap pihak untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun individu yang terlibat dalam pengelolaan Pendidikan harus dapat mempertanggung jawabkan semua keputusan yang diambil kepada publik.

Penerapan etika administrasi publik dalam pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kedua prinsip ini. Ketika masyarakat merasa informasi yang diberikan adalah transparan dan pengelola pendidikan dapat bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil, maka kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan akan meningkat. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Meskipun pentingnya penerapan etika administrasi publik dalam pendidikan sudah jelas, namun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tidak bisa dianggap remeh. Banyak lembaga pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun universitas, yang masih terjebak dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dalam pengelolaan pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang etika administrasi publik, sehingga keputusan yang diambil bisa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Di sisi lain, ada juga faktor eksternal yang memengaruhi penerapan etika, seperti budaya organisasi, tekanan politik, dan situasi ekonomi. Dalam beberapa situasi, tekanan untuk mencapai hasil yang cepat dan memuaskan dapat mendorong individu atau lembaga untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan yang ada agar solusi yang tepat dapat dirumuskan.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan, dibutuhkan berbagai strategi yang terintegrasi. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas

sumber daya manusia di lembaga pendidikan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika administrasi publik. Pelatihan dan pendidikan tentang etika dalam pengelolaan pendidikan harus menjadi bagian integral dari kurikulum pengembangan profesional bagi para pendidik dan pengelola.

Kedua, penerapan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, lembaga pendidikan dapat membuka akses informasi tentang anggaran, program, dan hasil yang dicapai kepada masyarakat luas. Ini akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Ketiga, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui audit internal, laporan berkala, serta pengembangan system pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan dugaan pelanggaran etika.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan etika administrasi publik dalam konteks tata kelola pendidikan. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik. Melalui pembahasan ini, kami berharap para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat memperoleh wawasan yang berguna dalam upaya mereka menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan.

Prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik, tantangan dalam implementasinya, dan strategi-strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu ini, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi pentingnya etika dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif. Penerapan etika administrasi publik dalam pendidikan bukan hanya merupakan keharusan moral, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih akuntabel. Dalam dunia yang terus berkembang, penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi sarana yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan yang berfokus pada etika, transparansi, dan akuntabilitas, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.

Metode penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan ketertarikan antar kegiatan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian

deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social.

Menurut saryono (2010) mengungkapkan bahwa studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak social yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian. Hakikat penelitian kualitatif merupakan kegiatan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian untuk memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan (sugiyono,2016).

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena peneliti beranggapan bahwa penelitian tersebut didasarkan atas fenomenologi yang pada dasarnya bertujuan agar memperoleh pengertian dan pemahaman berkaitan tentang perilaku manusia itu sendiri. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara komperheensif tentang peran administrasi pendidikan dalam pengembangan etika administrasi.

Dalam melaksanakan pengumpulan data, dibutuhkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam melaksanakan penelitian agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pedoman wawancara terstruktur yang di ajukan pada kepala sekolah dan guru. Prosedur analisis data merupakan salah satu cara atau tahapan-tahapan untuk mengolah dan menganalisis sebuah data menjadi variasi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Permasalahan yang ditinjau dalam prosedur analisis data adalah masalah yang memang menjadi concern dalam penelitian yang dilakukan. Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka analisis data yang dilakukan melalui:

Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai institusi pendidikan, terlihat bahwa penerapan etika administrasi publik sangat mempengaruhi kualitas tata kelola pendidikan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Studi ini mencakup wawancara mendalam dengan pemimpin dan staf pendidikan, analisis dokumen institusi, serta observasi terhadap praktik sehari-hari di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan

Institusi yang menerapkan etika administrasi publik secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Transparansi ini tidak hanya terlihat pada keterbukaan informasi anggaran dan kebijakan sekolah yang mudah diakses, tetapi juga dalam cara institusi mempublikasikan hasil keputusan rapat penting, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kinerja secara berkala. Transparansi semacam ini meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan, seperti guru, staf, orang tua, dan masyarakat, dalam pengawasan dan proses pengambilan keputusan. Hal ini juga

menciptakan lingkungan yang terbuka dan kolaboratif, di mana masukan dari berbagai pihak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan.

2. Akuntabilitas Manajerial dan Profesionalisme

Dalam institusi yang mengedepankan etika administrasi publik, prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sangat dijunjung tinggi. Penerapan prinsip ini membuat para pengelola institusi pendidikan memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi dalam manajemen sumber daya dan pengambilan keputusan. Misalnya, mereka merasa bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan anggaran dan capaian program pendidikan secara berkala kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Para kepala sekolah atau direktur juga cenderung lebih memperhatikan transparansi dalam penilaian kinerja dan sistem penghargaan. Hasilnya, pengelola lebih sadar akan pentingnya profesionalisme yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang etis dan bertanggung jawab.

3. Kualitas Layanan Pendidikan yang Lebih Baik

Etika administrasi publik mendorong pengelola Pendidikan untuk memperhatikan kualitas layanan yang mereka berikan kepada siswa, orangtua, dan masyarakat. Prinsip etika ini membantu mengarahkan mereka pada layanan berkualitas, seperti perbaikan kurikulum yang berbasis kebutuhan siswa, peningkatan fasilitas, dan pengembangan guru yang berkelanjutan. Peningkatan ini terlihat dari kepuasan orang tua yang meningkat, komitmen guru yang lebih tinggi, dan siswa yang mendapatkan manfaat dari layanan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

4. Pengurangan Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Penerapan kode etik yang ketat dalam institusi pendidikan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan etika administrasi publik, terdapat sistem pengawasan yang lebih jelas, sehingga tindakan penyimpangan atau pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Di beberapa institusi, ditemukan adanya kebijakan pelaporan yang terbuka bagi seluruh staf dan masyarakat untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau pengelolaan keuangan yang tidak sesuai. Sistem yang beretika ini menimbulkan rasa kepercayaan pada institusi pendidikan, sehingga dana yang tersedia digunakan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat bagi siswa.

5. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Tinggi

Salah satu hasil penting lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi institusi pendidikan. Masyarakat merasa memiliki hak untuk terlibat, baik melalui komite sekolah maupun dalam kegiatan monitoring lainnya, karena mereka melihat adanya transparansi dan keterbukaan dari pihak sekolah. Ini membantu membangun kepercayaan dan mendukung terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara institusi Pendidikan dan masyarakat sekitar..

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan etika administrasi publik memiliki dampak yang mendalam terhadap tata kelola pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam bentuk praktik nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta integritas institusi. Pembahasan lebih rinci dapat dilihat dalam poin-poin berikut:

1. **Transparansi Sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pendidikan** Transparansi adalah elemen penting dalam tata kelola yang baik, terutama dalam konteks institusi pendidikan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi penting, seperti rencana anggaran, laporan keuangan, dan kebijakan sekolah. Dengan penerapan etika administrasi publik, pengelola pendidikan lebih terbuka dalam menyediakan informasi ini, sehingga mencegah adanya penyalahgunaan dana publik dan meningkatkan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi juga dapat membantu mencegah konflik kepentingan, karena para pemimpin institusi terhindar dari pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

2. **Akuntabilitas sebagai Cermin Etika dalam Pelayanan Publik** Akuntabilitas menjadi cerminan etika yang diterapkan dalam pelayanan publik, termasuk dalam tata kelola pendidikan. Akuntabilitas ini tidak hanya meliputi laporan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dari para pemimpin dan staf pendidikan untuk bertindak jujur dan adil. Akuntabilitas tersebut ditunjukkan melalui kesediaan mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai bahwa para pengelola institusi pendidikan bertindak sesuai dengan prinsip etika dan bertanggung jawab atas keputusan mereka.
3. **Peran Etika dalam Membangun Budaya Profesionalisme dan Integritas** Etika administrasi publik membantu membangun budaya kerja yang berbasis pada profesionalisme dan integritas di lingkungan pendidikan. Profesionalisme berarti bahwa setiap orang dalam institusi bertindak sesuai standar dan memenuhi tanggung jawab dengan baik. Namun, lebih dari itu, etika menuntut agar profesionalisme ini didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Sebagai contoh, dalam proses penerimaan siswa baru, etika membantu memastikan bahwa proses dilakukan secara adil tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi. Dengan begitu, etika administrasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga membangun budaya yang mendukung kinerja yang berkelanjutan.
4. **Mendorong Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pendidikan** Institusi pendidikan yang beretika dan akuntabel secara alami akan menarik lebih banyak partisipasi masyarakat.

Partisipasi ini mencakup peran aktif dalam komite sekolah, evaluasi program pendidikan, dan dukungan dalam pengawasan anggaran. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai proses ini, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan semakin meningkat. Partisipasi publik yang tinggi juga dapat memberikan masukan berharga yang membantu institusi Pendidikan dalam menyesuaikan kebijakan dan program mereka untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Mengurangi Korupsi melalui Kode Etik yang Kuat Salah satu manfaat penting dari penerapan etika administrasi publik adalah pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam institusi pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa kode etik yang diterapkan secara konsisten mendorong pengelola untuk beroperasi dengan integritas, mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Selain itu, adanya penegakan kode etik juga menciptakan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipantau, sehingga mereka yang bertanggung jawab lebih berhati-hati dalam setiap keputusan. Hal ini sangat penting dalam mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan siswa dan masyarakat.

kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik dalam tata kelola pendidikan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas institusi pendidikan. Hasil ini memperlihatkan pentingnya etika dalam membangun institusi pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu memberikan layanan yang adil dan berkualitas. Transparansi memastikan akses informasi yang merata, akuntabilitas menjaga pertanggungjawaban yang jelas, dan integritas membangun profesionalisme serta kepercayaan yang kokoh. Dengan dukungan etika administrasi publik, tata kelola pendidikan dapat berkembang menjadi lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan yang merata dan berkesinambungan.

Daftar pustaka

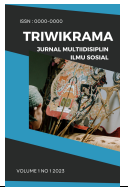
- Beerli, Itai, et al. (2013). "Ethics Education in Local Government: Applying an Ethical Framework for Good Governance." *Public Integrity*, 15(4), 349-366.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, H. George, & Ghore, Richard K. (2005). *Ethics in Public Management*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Frederickson, H. George. (1997). *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey- Bass Publishers.
- Lipsky, Michael. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Osborne, David, & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 6, Number 10, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Sedarmayanti. (2017). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14. 2008.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20. 2003.